



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGUATAN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung efektifitas terciptanya budaya anti gratifikasi, perlu adanya komitmen dari semua pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk tidak memberi dan menerima segala bentuk gratifikasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
4. Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Membuat pernyataan menerima atau tidak menerima gratifikasi secara periodik (per semester) dan disampaikan kepada UPG di lingkungan kerja masing-masing, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

- KEDUA : Para pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi untuk menjaga pelapor dari pihak pemberi gratifikasi maupun terhadap timbulnya diskriminasi di unit kerja tempat pelapor gratifikasi bekerja.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Demikian Surat Pernyataan yang ke ...*) ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*) diisi dengan jumlah surat pernyataan yang sudah dibuat.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJUDI HERPRIARSONO

